

Menteri BUMN Diminta Aktif Bahas Tol Trans Sumatera

JAKARTA – Menteri BUMN Dahlan Iskan diminta lebih aktif membahas persetujuan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya untuk pembangunan tol trans Sumatera. Hal ini terkait dengan adanya penolakan Komisi VI DPR RI terhadap rencana PMN pada proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku heran mengapa Komisi VI tidak menyetujui rencana pemerintah untuk

mempercepat pembangunan jalan tol trans Sumatera. Padahal, pemerintah dipastikan sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 5 triliun untuk direalisasikan pada tahun ini.

“Iya (pembangunan tol Trans Sumatera akan terlambat), oleh sebab itu dibahaslah. Dahlan Iskan harus rajin membahas dengan komisi VI, karena kenapa mereka merasa kalau ini belum dibahas, saya tidak tahu. Padahal ini sudah (disiapkan) Rp 5 triliun,” ujar Hatta di Jakarta, Jumat (15/9).

Menurut Hatta, apabila anggaran tersebut tidak disetujui DPR berarti

proyek tol trans Sumatera tidak bisa dijalankan pada tahun ini. Dia juga menyesalkan keterlambatan pembahasan persetujuan tersebut, karena pihaknya sudah menetapkan ruas tol yang akan dibangun, mulai dari Lampung, Palembang hingga Dumai.

Dia juga mengaku tidak bisa melakukan pembahasan dengan DPR guna melobi pencairan anggaran tersebut, sebab kewenangannya berada di Kementerian BUMN, sebagai kementerian teknis.

“Ini yang sayang menurut saya. Dana sudah ada, kita bisa memulai tahun ini. Sekarang, marilah aktif di

komisi VI, apa masalahnya, kan Menko tidak bisa melakukan rapat bersama komisi,” kata dia.

Sekadar informasi, Selasa (10/9) lalu, Komisi VI DPR RI menolak alokasi PMN untuk PT Hutama Karya terkait pembangunan proyek jalan tol trans Sumatera.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, dalam pengajuan PMN tersebut, pemerintah menyiapkan Rp 2 triliun untuk Hutama Karya dalam pembangunan jalan tol trans Sumatera tahun ini. Selain itu, kata dia, pemerintah akan menambah PMN untuk Hutama Karya tahun depan

hingga seluruhnya mencapai Rp 7,1 triliun.

Menurut Dahlan, pihaknya akan mengirim surat lagi ke Komisi VI DPR RI agar PMN Hutama Karya dapat disetujui. Dia berpendapat dengan menyuruti kembali, pemerintah sudah bertindak sesuai UU.

“Besok atau lusa, bisa saja masuk APBN berikutnya, karena bulannya sudah hampir habis juga tahun ini. Tapi, kewajiban BUMN mengajukan surat itu, cuma suratnya itu dilengkapi konsiderans bahwa surat ini ditujukan untuk mengamatkan UU,” kata Dahlan. (wyu)